

PRESIDEN IKUT KAMPANYE TAK LANGGAR ATURAN TAPI CACAT ETIKA

Bila sebelumnya keukeuh tak akan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin jelas memperlihatkan keberpihakannya. Tanpa tedeng aling-aling Jokowi mengatakan presiden dapat ikut kampanye dan memihak salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Namun perlu dicatat, ada larangan pemanfaatan fasilitas negara. Masalahnya, di Indonesia sulit untuk memisahkan fasilitas negara yang bisa digunakan dan mana yang harus ditinggalkan. Pernyataan itu dinilai akan semakin menunjukkan ketidaknetralan. Dari segi etika politik, sikap presiden tersebut dipandang tidak baik, meski aturan perundang-undangan tidak melarangnya. Yang perlu digarisbawahi, bila ikut turun kampanye maka presiden harus mengajukan cuti. Diketahui, pendamping capres nomor urut 2, Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Panik?

Baca di hal 11....

Presiden Joko Widodo saat penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Rabu (24/1/2024). (X/@jokowi).

**Government (Hal.2)
Impor LPG Bengkak,
Pemerintah Bakal
Perluas Hilirisasi
Ke Sektor Migas**

ATURAN SOAL KAMPANYE

Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu

PASAL 299

- (1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

PASAL 300

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PASAL 302

- (1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

UU Pemilu juga mengatur hal yang tak boleh dilakukan Presiden, menteri hingga pejabat negara lain dalam berkampanye. Berikut aturannya:

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikucualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Impor LPG Bengkok, Pemerintah Bakal Perluas Hilirisasi ke Sektor Migas

JAKARTA- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan turut memperluas program hilirisasi ke sektor minyak dan gas bumi (migas).

Diakuinya bila kemiskinan di Indonesia masih belum bisa ditumpas sepenuhnya meski program penghiliran sudah berjalan. Permasalahannya, proyek hilir yang diklaim sudah berjalan baik baru dari sektor pertambangan mineral logam.

"Makanya, kami Kementerian Investasi wajib berkolaborasi dengan UMKM daerah agar [pertumbuhan ekonomi] jangan [terpusat di] Jakarta lagi, Jakarta lagi. Saya setuju masih ada perbaikan dalam hilirisasi, tetapi tidak mungkin [disetop]," ujarnya di sela konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1/2024).

Atas dasar itu, dia mengatakan pemerintah akan memastikan kemiskinan di areal tambang yang sudah terjamah proyek hilirisasi tidak terjadi lagi. Salah satunya adalah dengan memperluas program penghiliran ke sektor-sektor lainnya.

"Seperti sektor pertanian. Jujur saya, setelah ini juga sektor migas. Impor LPG kita 6 juta ton per tahun. Itu impornya US\$852 per ton. Apakah kita tidak bisa buat di dalam negeri? Bisa, kita punya gas," tegasnya.

Target Investasi 2024 Rp1.650 T

Di sisi lain Bahlil Lahadalia optimistis target investasisenilai Rp1.650 triliun pada tahun ini akan tercapai meski investor cenderung wait and see menunggu hasil Pemilu 2024. "Begitu ada perintah dari Presiden, target Rp1.650 triliun tahun ini, maka saya dengan tim, DPMPSTP [Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu], setelah rakor kemarin mereka katakan akan tetap, tidak melakukan penyesuaian target," katanya.

Bahlil mengatakan, untuk mengejar target investasi tersebut, dinamika politik di tengah pemilu tetap harus dijaga stabil. "Namanya politik itu pasti ada dinamika, tapi harus kita pikirkan kedewasaan agar investor yakin. Investor itu cuma dua saja, merasa aman dan trust," jelas Bahlil.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintahan terus mendorong peningkatan investasi pada sektor infrastruktur dan hilirisasi. Investasi pun akan diperluas pada sektor-sektor lainnya, tidak hanya pada sektor pertambangan. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, meningkat 17,5% secara tahunan.

Bahlil mengatakan, realisasi investasi tersebut melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun pada



Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1/2024). (tangkap layar)

2023. "Target kami dari Presiden dinaikkan jadi Rp1.400 triliun, target RPJMN Rp1.900,8 triliun dan alhamdulillah tercapai Rp1.418,9 triliun," katanya. Dengan realisasi investasi tersebut, Bahlil mengatakan sebanyak 1,82 juta tenaga kerja telah terserap sepanjang 2023.

Capaian realisasi investasi sepanjang Oktober-Desember 2023 itu terdiri dari realisasi PMA sebesar Rp184,4 triliun (porsi 50,4 persen) dan realisasi PMDN sebesar Rp181,4 triliun (49,6 persen). Realisasi PMA tumbuh 5,3 persen secara yoy dan realisasi PMDN tumbuh 29,9 persen yoy sepanjang periode ini.

Berikutnya, lima sektor utama di triwulan IV 2023 yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, pertambangan,

transportasi, gudang dan telekomunikasi, industri kimia dan farmasi, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Realisasi investasi kuartal IV 2023 tersebar paling banyak di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Banten.

Kendati demikian, realisasi investasi tersebut tidak seimbang dengan serapan tenaga kerjanya. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, dari total realisasi investasi 2023, serapan tenaga kerja hanya mencapai 1.823.543 pekerja.

Bahlil mengakui memang capaian realisasi investasi sepanjang 2023 tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan. Hal ini karena investasi banyak bertumpu pada industri padat modal atau teknologi,

yang tidak membutuhkan lebih banyak pekerja.

"Saya akui realisasi investasi belum berbanding lurus dengan lapangan kerja. Kenapa? Karena investasi kita banyak di padat teknologi, padat modal. Tetapi bersyukur mampu menciptakan tenaga kerja 1,8 juta," tuturnya.

Ia menyampaikan, untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju tidak bisa dengan mengandalkan lapangan kerja di sektor padat karya. Hal ini karena pendapatan per kapita Indonesia tidak akan meningkat, sebab gaji karyawan di sektor tersebut masih terbilang kecil.

"Sampai ayam tumbuh gigi negara kita nggak akan bisa maju, karena padat karya gajinya terukur. Tetapi kalau kerja di industri pasti penciptaan lapangan kerja dengan upah yang cukup layak dan itu adalah cara kita dorong GDP kita bisa mencapai diatas US\$ 10.000, sedangkan sekarang S\$ 5.100 per kapita," ungkapnya.

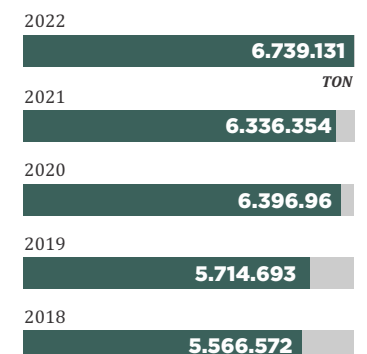
Maka dari itu, Bahlil akan mendorong investasi khususnya di sektor hilirisasi agar pendapatan pekerja menjadi lebih layak. Disamping itu, keterampilan pekerja juga harus diasah agar bisa menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang. (wid,rls,ist/dya)

KOMPONEN DAN TOTAL SUBSIDI ENERGI (2014-2024)

Tahun	Bbm & Lpg / Triliun Rupiah	Listrik / Triliun Rupiah	Total / Triliun Rupiah
2014	63.8	56.6	120.4
2015	43.7	58	101.7
2016	47	45.7	92.7
2017	97	48.1	145.1
2018	84.2	51.7	135.9
2019	47.7	48	95.7
2020	83.8	49.8	133.6
2021	115.6	58.8	177.4
2022	74.8	70.5	145.3
2023	95.6	64	159.6
2024	113.3	73.6	186.9

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

VOLUME IMPOR LPG INDONESIA (2018-2022)



DPR Tak Efektif Wakil Rakyat, Tata Pemerintahan Jokowi Disoroti



Pekerja di Jakarta memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak dan rendahnya upah buruh, serta meminta pemerintah untuk mencabut UU Ciptaker. (ilustrasi/dok)

JAKARTA-Indonesian Parliamentary Center (IPC) mencatat, ada banyak fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang tak efektif dijalankan. Baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen.

Ironisnya, meski terdapat 627 instruksi yang dibuat DPR kepada pemerintah dalam rapat pengawasan sepanjang 202, hanya sedikit yang dijalankan. Detilnya, mayoritas atau sebanyak 527 instruksi (80%) yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan sebanyak 128 instruksi (20%) dilaksanakan oleh pemerintah.

Praktisi good governance As'ad Nugroho menyampaikan, dengan data itu berarti Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. "Begitu juga di BUMN, governance-nya buruk. Biasanya di BUMN ada assessment tata kelola, tapi entah mengapa, belakangan tidak ada lagi itu," ucap As'ad dalam Podcast Narada Syndicate yang dipandu oleh aktivis Kusfiardi dikutip di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

As'ad menilai, berbagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, demokrasi serta hukum sudah diabaikan pemerintahan Jokowi. Hal itu, disebabkan Presiden Jokowi tidak memiliki perhatian besar pada pentingnya tata kelola sejak periode pertama pemerintahannya.

"Bisa kita lihat dalam 100 hari pertama pemerintahannya, justru terjadi pelebaran KPK, yang menunjukkan lemahnya komitmen Presiden Jokowi pada pemberantasan korupsi. Padahal persoalan korupsi itu adalah akar dari buruknya tata kelola," ujarnya.

As'ad menganggap, Jokowi juga

gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan pribadi maupun keluarga. Seharusnya, sambung dia, Jokowi mampu mencegah keluarganya maupun orang dekatnya untuk memanfaatkan jabatan presiden agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tak bisa punah.

Padahal, menurut As'ad, tujuan dari gerakan reformasi 1998 ketika menggulingkan Presiden Soeharto adalah bertujuan memberantas KKN. Namun, kata dia, Presiden Jokowi sekarang menunjukkan komitmen yang lemah dalam pemberantasan KKN, bahkan sejak periode pertama pemerintahannya.

"Hal itu disebabkan Pak Jokowi tak ikut dalam gerakan reformasi, sehingga dia tidak bisa memahami bahwa musuh utama reformasi adalah KKN. Maka komitmen dia untuk memberantas KKN pun lemah," ujar As'ad.

Disfungsi Legislasi hingga Anggaran

Sebelumnya Indonesian Parliamentary Center (IPC) mencatat disfungsi legislasi, ada beberapa UU yang mendesak namun tidak terselesaikan yaitu RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. IPC pun memberikan gambaran keterbukaan pembentukan undang-undang pada tahun 2023. "Kami fokuskan hanya untuk 18 RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah pada Prolegnas Prioritas Tahun 2023 (naskah akademik, naskah RUU, dan risalah)," tulis IPC dalam keterangan tertulisnya.

RUU yang dimaksud yakni, hanya 2 RUU dari 18 RUU, yang diumumkan naskah RUU dan naskah akademiknya. Kemudian hanya 1 RUU dari 18 RUU, yang diumumkan risalahnya yaitu RUU tentang Landas Kontinen (UU No. 16 Tahun 2023). 18 RUU ini merupakan RUU prioritas tahun 2023 yang telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah.

Selanjutnya, terkait fungsi anggaran DPR. "Ada ketidakseimbangan pengalokasian yang perlu dilihat oleh DPR dalam pembahasan APBN 2023 ini. Tidak ada penjelasan mengapa DPR mengalokasikan satu kementerian lebih besar dibanding kementerian yang lain. Karena, secara logika setiap pengalokasian anggaran di satu bidang, akan mengorbankan kepentingan publik di bidang yang lain. Argumentasi yang kuat memberikan pemahaman kepada publik tentang mengapa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan baik sebagaimana mestinya," sebut IPC.

Catatan kedua adalah tentang pengelolaan aspirasi pembangunan yang tidak transparan, partisipatif dan akuntabel. Salah satu instrumen yang dipergunakan DPR untuk dapat mengintervensi RAPBN adalah Usulan Program dan Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Dampaknya, alokasi untuk UP2DP ini hanya dapat diakses secara terbatas di daerah pemilihan.

Catatan yang ketiga, mengenai alokasi anggaran untuk DPR mengalami kenaikan anggaran dari tahun ke tahun dan tidak Transparan. Pada 2021 DPR mengelola anggaran sebesar Rp5.416.163.047,130, lalu naik pada 2022 sebesar Rp5.602.921.531,931. Pada 2023 DPR mengelola anggaran sebesar dengan rincian Rp4.484.229.865.000 untuk fungsi kedewanan dan Rp1.613.982.690.000 untuk sekretariat Jenderal DPR RI.

Selain itu, lanjutnya, ada Panitia Kerja yang dibentuk khusus oleh Alat Kelengkapan Dewan untuk mengawasi isu spesifik mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pada tahun 2023, total terdapat 50 Panja Pengawasan DPR RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 Panja (58%) belum selesai dan sebanyak 21 Panja (42%) sudah selesai. Panja Pengawasan DPR RI dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah. Panja Pengawasan DPR RI dapat dibentuk oleh Badan Legislasi (Baleg) atau komisi-komisi di DPR RI. Selain Panitia Kerja, Pimpinan DPR RI juga membentuk tim pengawas untuk

menyelesaikan pengawasan yang sifatnya tidak terselesaikan melalui panja.

Temuan yang ada menyebutkan, Tim Pengawas DPR RI yang dibentuk oleh DPR RI sepanjang tahun 2021-2023 hanya tuntas satu saja yakni Timwas mengenai haji. "Hal ini dinilai pengawasan melalui Timwas juga tidak berjalan efektif dikarenakan ketidakmampuan Pimpinan DPR RI untuk mengkoordinir anggota Timwas DPR RI yang telah dibentuk," tutup IPC. (wid,rls,ist/dya)

4 UU MENDAPATKAN CATATAN KHUSUS.

UU CIPTAKER

Pembentukannya mengabaikan teknik penyusunan undang-undang, minimnya partisipasi publik, minimnya keterbukaan, dan adanya perubahan pasca kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Sikap DPR terhadap UU yang sebenarnya inkonstitusional ini, justru tidak tepat. DPR melakukan perubahan kedua UU PPP untuk dijadikan basis legitimasi teknik omnibus law secara surut.

UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

UU ini bermasalah sejak penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang tidak partisipatif, tidak terbuka, terburu-buru, dan lemah dalam kajian sebagaimana terlihat pada naskah akademik. UU ini hanya dibahas dalam waktu 41 hari, jika dihitung sejak rapat pembahasan pertama (RDPU) pada 8 Desember 2021 hingga disahkan pada 18 Januari 2022.

UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dibukanya ruang bagi TNI dan POLRI aktif untuk menduduki jabatan ASN tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19. Pasal ini jelas bertentangan dengan UU Polri pasal 28 ayat 3 dan UU TNI pasal 47 ayat 1. UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

UU Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada aspek transparansi, pembentukan UU tahun 2023 masih minim transparansi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Situs web DPR belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun keterbukaan.

Harga Jagung Naik, Peternak Ayam Menjerit

KEDIRI - Kenaikan harga jagung membuat para peternak ayam petelur di Kabupaten Kediri mengeluh. Untuk itu, sejak November 2023 hingga Januari 2024 Pemkab Kediri melalui Dinas Perdagangan (Disdag) telah menyalurkan 31.041 ton jagung bersubsidi kepada peternak ayam petelur. Penyaluran diberikan kepada 61 peternak berskala besar dengan total 25.041 ton dan 281 peternak berskala mikro berjumlah 6.000 ton.

Kepala Dinas Perdagangan Tutik Purwaningsih menyampaikan, penyaluran jagung subsidi sebagai tindak lanjut pasca kenaikan harga jagung yang menyebabkan banyak peternak yang mengeluhkan.

"September dan Oktober 2023 lalu harga jagung semula masih di bawah Rp7.000/kg. Pada Januari 2024 hingga saat ini sudah bertengger di harga Rp8.800/kg," kata Tutik, Rabu (24/1/2024).

Kenaikan yang cukup signifikan itu membuat pemerintah melakukan intervensi sebagai upaya mengatasi fluktuasi harga dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu ditandai program dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bappanas) yaitu memberikan bantuan jagung subsidi dengan harga lebih terjangkau.

"Artinya pemerintah menyiapkan jagung impor dengan harga lebih murah yaitu Rp4900/kg yang dialokasikan untuk kebutuhan selama 3 bulan bagi peternak," jelasnya.

Tutik menyebut alur penerima bantuan jagung tersebut bagi mereka (peternak) yang telah diverifikasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan pengurus asosiasi peternak Kabupaten Kediri.

Sesuai petunjuk teknis, penerima yang direkomendasikan adalah mereka yang telah menjadi kelompok berbadan hukum, belum tergabung di Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), maupun anggota koperasi.

Dengan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan peternak, pemerintah daerah berharap para peternak merasa terbantu dengan keterjangkauan harga dan jumlah stok jagung yang disediakan. "Setidaknya pada kondisi harga tinggi saat ini, barang juga sangat terbatas, kami berharap supporting yang diberikan betul-betul dimanfaatkan peternak," harapnya.

Di samping itu, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang bagaimana mengatur distribusi, mengawasi ketersediaan stok, dan memastikan ketepatan sasaran.

Jika nanti harga jagung masih belum terjangkau, bantuan akan kembali dilakukan kepada penerima yang sama, serta tambahan penerima berdasarkan usulan.

Sementara itu, dikutip dari KBR, harga pakan unggas melonjak akibat



Peternak ayam petelur sedang memanen telur, para peternak mengeluhkan kenaikan harga jagung sebagai makanan pokok ayam.

menipisnya ketersediaan jagung. Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, (GOPAN) Sugeng Wahyudi menyebut, harga pakan unggas terus naik dari tahun ke tahun. Bahkan dalam satu tahun bisa naik beberapa kali, sekitar 12 hingga 20 persen.

Sugeng mengungkapkan, peternak dari seluruh Indonesia merasakan dampak kenaikan harga pangan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kenaikan harga pakan dan harga jual ayam hidup.

"Di satu sisi pakannya naik, pergantian tahun ini kan naik nih, naik 200-400 rupiah per kilogram. Sementara harga ayam hidupnya masih di bawah biaya pokok kami. Hari ini kan 18 ribu sampai 19 ribu. Sementara pangan kan awal tahun ini kan udah naik antara 200 sampai dengan 400 rupiah dari Rp8.800," ujarnya dikutip dari KBR, Rabu, (17/1/2024).

Data situs Badan Pangan Nasional (Bappanas) per 19 Januari 2024, harga rata-rata nasional jagung tingkat peternak Rp8.050 per kilogram. Sedangkan harga acuan penjualan (HAP) jagung tingkat peternak Rp5 ribu per kilogram.

Dampak dari kenaikan harga pakan khususnya jagung, peternak di Kabupaten Karangasem, Bali, peternak terpaksa menyortir ayam yang sudah tidak produktif bertelur untuk dijual. Ini untuk mengurangi biaya pembelian pakan unggas, karena harga jagung pakan dari Rp4.500 meroket jadi lebih dari Rp10 ribu per kilogram.

Keluhan juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Desianto Budi Utomo. Kata dia, 85 persen harga pokok pakan unggas tergantung dari harga bahan baku pakan baik lokal maupun impor.

"Pada situasi terakhir harga jagung di Pulau Jawa pada Januari sudah mencapai angka Rp9.500 per kilogram, setelah jauh melebihi dari harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional yaitu sekitar Rp5.000 per kilogram jagung. Dengan meningkatnya harga bahan pakan tentu akan berpengaruh terhadap cost produksi pakan itu sendiri," ujar Ketua

Umum GPMT Desianto Budi Utomo, Kamis, (18/1/2024).

Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo mendorong pemerintah memiliki cadangan jagung pakan nasional yang bisa dikeluarkan jika kondisi kritis seperti saat ini. Desianto juga mengimbau pemerintah meningkatkan kualitas benih dan memperluas areal tanam jagung nasional.

Terkait masalah ini, pemerintah menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Jakarta, yang salah satu agendanya membahas mahalannya harga jagung pakan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan, kenaikan harga pakan unggas berpotensi ikut mengerek kenaikan harga daging dan telur.

"Juga tadi dibahas jagung karena perlu sekali untuk pakan ternak dan ayam petelur dan ayam potong kira-kira itu intinya. Persiapan walaupun masih jauh, Lebaran, tetapi sudah dibahas, dipersiapkan dari sekarang jauh-jauh hari," kata Zulhas di Istana Negara, Kamis, (18/1/2024).

Sementara itu, Anggota Komisi bidang Pertanian DPR, Slamet mendorong pemerintah memberi dukungan penuh bagi petani untuk menanam jagung.

"Pemerintah harus menyelesaikan masalah distribusi logistik. Caranya bagaimana? yaitu berikan kepastian kepada petani-petani kita untuk bercocok tanam jagung. Berikan kalau perlu insentif atau paling tidak pastikan ketika dia menanam jagung dibeli oleh pemerintah dengan harga yang dia dapat untung," ujar Slamet.

Slamet menambahkan, harga pakan unggas yang meroket saat ini dikarenakan pemerintah gagal memprediksi ketersediaan jagung pakan. Kegagalan ini antara lain karena pemerintah jarang mendengar keluhan petani dan peternak.

"Nah, di situlah ketika kemudian pemerintah hadir dengan membeli seluruh produk pertanian yang berupa jagung, maka stok jagung akan cukup. Nah ketika stok jagung cukup, maka kebutuhan peternak kita akan terpenuhi," ujarnya.

Menyikapi situasi tersebut, pemerintah diminta tidak asal asal

mengimpor jagung guna menekan harga pakan unggas. Namun, di sisi lain, pemerintah jangan sampai terlambat menstabilkan harga pakan unggas.

Karena, menurut Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar, bila terlambat, maka bisa dipastikan dampaknya berantai yakni naiknya harga daging, telur, dan memicu inflasi.

"Jagung itu kan akan memengaruhi pendapatan. Kalau itu kurang maka harga jagungnya kan naik. Mencari substitusi daripada jagung kan tidak mudah. Jadi, yang relatif lebih penting untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi jagung. Program-programnya apa gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian ya harus serius untuk meningkatkan produksi jagung," ujar Hermanto.

Hermanto Siregar mendesak pemerintah menghentikan kenaikan harga pakan unggas yang bisa terjadi beberapa kali dalam setahun. Caranya, dengan meningkatkan produksi bahan baku pakan unggas yaitu jagung. Kementerian Pertanian harus serius menargetkan berapa ton jagung bisa dihasilkan dengan menggunakan bibit jagung unggul. (gos/lut)



“

September dan Oktober 2023 lalu harga jagung semula masih di bawah Rp7.000/kg. Pada Januari 2024 hingga saat ini sudah bertengger di harga Rp8.800/kg. Artinya pemerintah menyiapkan jagung impor dengan harga lebih murah yaitu Rp4900/kg yang dialokasikan untuk kebutuhan selama 3 bulan bagi peternak,"

**TUTIK
PURWANINGSIH**
KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Jumlah Perokok Anak di Indonesia Terus Meningkatkan

SURABAYA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus berupaya untuk menekan jumlah perokok anak dengan memaksimalkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat. Sebab, jumlah perokok di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam kurun 2013 hingga 2019, terutama pada usia anak dan remaja.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 prevalensi perokok pada usia 10 hingga 18 tahun berjumlah 7,2 persen, naik menjadi 9,1 persen pada 2018. Dalam kurun waktu lima tahun perokok usia anak dan remaja meningkat sekitar dua persen lebih.

Jumlah itu sejalan dengan hasil survei dari Global Youth Tobacco pada 2019 bahwa peningkatan prevalensi perokok pada usia sekolah 13 sampai 15 tahun naik dari 18 persen jadi 19 persen. Pada 2020, The Tobacco Atlas menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India.

Lebih dari 27 juta perokok tembakau dewasa di Indonesia berisiko terkena penyakit menular dan tidak menular.

Selain itu, Institute for Health Metrics and Evaluation pada 2019 melaporkan rokok tembakau berisiko meningkatkan risiko kanker trakea, bronkus, dan paru-paru sebesar 59,6 persen, 59 persen mengakibatkan penyakit paru obstruksi kronik, 28 persen memicu gangguan jantung, dan 19 persen mengakibatkan diabetes melitus.

Selain dampak negatif pada kesehatan konsumen, rokok tembakau juga memiliki dampak pada sosial dan ekonomi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2021 melaporkan pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok tiga kali lebih banyak daripada pengeluaran untuk belanja protein. Bahkan, belanja rokok adalah terbesar kedua pengeluaran rumah tangga atau tiga kali lebih tinggi dari beli telur, daging ayam, dan lainnya.

Selain itu, belanja rokok menempati porsi pengeluaran terbesar kedua di rumah tangga miskin sebesar 11,9 persen, baik di rumah tangga perkotaan maupun pedesaan.

"Karena kita ketahui, bahwa prevalensi perokok anak kita terus naik, tahun 2018 itu 9,1 persen, target kita di tahun 2024 itu 8,7 persen," kata Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih, se usai mengisi workshop penguatan implementasi kawasan tanpa rokok yang diadakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (24/1/2024).

Benget juga mengungkapkan salah



Sejumlah anak bermain di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Taman Situ Cibinong Plaza, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

satu penyebab peningkatan jumlah perokok anak adalah karena meniru orang tua atau keluarga yang merokok.

Benget mengatakan, pemerintah sendiri memiliki sejumlah upaya untuk melakukan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, salah satu di antaranya yakni penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 7 tatanan.

"Penetapan KTR ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari asap rokok orang lain dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih dan sehat," kata Benget.

Ia menambahkan, pelaksanaan penegakan KTR membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) melalui APBD. Pemda bisa menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok.

"Namun belum banyak daerah yang telah memiliki peraturan daerah terkait KTR memanfaatkan dana tersebut," tambah Benget dikutip dari beritajatim.

Ia menyebut, ada beberapa tempat yang akan menjadi fokus Kemenkes dalam mewujudkan kawasan bebas asap rokok tersebut, yakni di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan juga Laboratorium.

Kemudian di sarana belajar mengajar, seperti di sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, juga di tempat bermain anak, tempat ibadah, sarana transportasi, tempat kerja dan tempat-tempat umum lainnya.

"Ini harus jadi kawasan tanpa rokok. Jadi kita tidak melarang orang merokok, tapi mengatur orang jangan merokok di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi," katanya dikutip

dari suara Surabaya.

Penggunaan DBHCHT dan pajak rokok, lanjut dia, dapat menjadi peluang untuk peningkatan optimalisasi jangkauan KTR di kabupaten/kota di Jatim. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia soal peningkatan tarif cukai rokok dengan kenaikan rata-rata sekitar 12 persen pada tahun 2021.

"Tujuan dari kebijakan ini tidak hanya untuk mengendalikan konsumsi rokok, tetapi juga mempertimbangkan dampak kesehatan yang akan ditimbulkan," jelas Benget.

Benget membeberkan, penggunaan DBHCHT di sejumlah daerah dipakai untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Universal Health Coverage, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan non kesehatan.

Namun belum banyak daerah yang memanfaatkan DBHCHT dan pajak rokok untuk optimalisasi pelaksanaan KTR, dimana saat ini menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan asap rokok, khususnya pada perokok pasif.

"Ini sekaligus mendukung gaya hidup yang lebih sehat di tengah masyarakat khususnya perokok untuk menahan diri agar tidak merokok di sembarang tempat," tandasnya.

Dengan upaya tersebut, ia mengatakan bahwa selain bisa mencegah anak merokok, juga akan memiliki beberapa dampak positif, seperti memberikan lingkungan yang bersih tanpa bau asap rokok, mencegah paparan asap rokok terhadap orang yang tidak merokok, dan sebagai inisiasi seseorang untuk berhenti merokok.

"Kalau orang mau berhenti merokok, itu akan meningkatkan produktifitas kinerja. Contoh, kalau orang dalam kantor dia perokok,

otomatis mulutnya asam karena adiksi. Satu jam dia keluar untuk merokok. Akhirnya, kerjanya dia lebih banyak merokok daripada kerjanya. Nah, itu tujuannya agar menurunkan jumlah perokok," jelasnya.

Ia mengatakan, soal kebijakan merokok di tempat umum, juga sudah ada aturannya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang didalamnya menyebutkan soal sanksi dan pidana bagi orang yang melanggar merokok di kawasan tanpa rokok, yakni denda maksimal Rp50 juta.

"Ada daerah, kalau ada yang merokok di KTR ditegur, KTP-nya disimpan. Kalau ketahuan merokok lagi, baru langsung kena denda, maksimal 50 juta Rupiah. Tapi kan tergantung daerah ya, karena maksimalnya 50 juta," ucapnya.

Dengan memaksimalkan upaya tersebut, dan dengan memberi pengetahuan bahaya merokok lewat berbagai kegiatan seperti workshop, ia berharap ke depan KTR di berbagai daerah di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

"Memang kawasan tanpa rokok ini salah satu upaya kita untuk mengendalikan perokok, jadi jangan merokok di kawasan tanpa rokok," pungkasnya.

Sementara itu, dikutip dari CNNIndonesia, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan setidaknya sebanyak 449 dari total 514 wilayah kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). "Jumlah tersebut kami perbarui per Mei 2023," kata Maxi.

Dari total daerah yang telah memiliki aturan KTR, sebanyak 341 kabupaten/kota atau setara 66 persen dalam bentuk peraturan daerah (perda) KTR dan 259 kabupaten/kota dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan wali kota (perwal). "Sampai saat ini masih ada 65 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki peraturan tentang KTR," katanya.

Menurut Maxi, pengesahan aturan KTR di daerah masih kurang kuat jika tidak diiringi dengan kebijakan implementasi serta sanksi yang mengingat bagi setiap pelanggar. "Perda atau perwal ini menurut kami masih kurang kuat, karena baru sampai pembentukan aturan, belum sampai pada implementasi," katanya.

Kemenkes sedang menggodok ketentuan sanksi bagi pelanggar KTR sambil menunggu ketentuan KTR mencapai 100 persen di daerah. "Kalau 100 persen KTR sudah ada, sambil menunggu, kami akan mulai bagaimana implementasi KTR tersebut agar berjalan sekaligus dan harus sudah ada penerapan sanksi," katanya. (lut/dya)

Tahun 2024, Pemkot Batu Bidik Investasi Sebesar Rp 840 Miliar



Salah satu destinasi wisata di Kota Batu yang ramai menarik kunjungan wisatawan. (Santi/Lenteratoday)

BATU - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Dyah Lies Tina, mengungkapkan proyeksi investasi yang akan masuk ke Kota Batu pada tahun 2024, sebesar Rp 840 miliar. Pihaknya optimistis karena didukung oleh tren kunjungan wisatawan yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Terlebih menurutnya, capaian realisasi investasi di tahun 2023 berada di angka Rp 1,5 triliun, yang artinya telah berhasil melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 700 miliar.

"Untuk Tahun 2023 target investasi Rp 700 miliar dan terealisasi Rp 1,5 triliun. Jadi di 2024 ini kami menargetkan investasi yang masuk ke Kota Batu mencapai Rp 840 miliar. Kami optimis investasi ini bisa terealisasi dengan tingginya kunjungan wisatawan di Kota Batu setiap tahunnya," ujar Dyah, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (24/1/2024).

Dyah juga menyebutkan, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan pada

tahun 2023 kemarin telah mencapai 9,5 juta, mendekati pencapaian target sebesar 10 juta kunjungan.

Dalam hal ini, Dyah memandang bahwa sektor pariwisata merupakan tulang punggung pertumbuhan investasi, dengan dukungan dari sektor-sektor lain, seperti konstruksi, kesehatan, jasa, perdagangan, pertanian, dan pendidikan yang juga memberikan kontribusi yang signifikan.

"Jadi kami akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para investor, kemudian menyajikan potensi-potensi yang menarik dari Kota Batu. Dan yang terpenting, memberikan kemudahan dalam proses investasi di Kota Batu," tukas Dyah.

Terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menggarisbawahi peran kunci Kota Batu sebagai destinasi wisata dan magnet investasi. Menurutnya, peningkatan investasi yang konsisten selama beberapa tahun terakhir mencerminkan minat yang berkelanjutan dari para investor.

Kendati prestasi perekonomian ini patut diacungi jempol, Pj Aries memperingatkan perlunya memastikan keberlanjutan investasi dan memastikan bahwa seluruh proyek beroperasi dengan berbasis lingkungan. Pj Aries juga menekankan pentingnya keterlibatan warga lokal dalam proyek, serta perlunya investasi yang mematuhi standar keberlanjutan.

"Artinya investasi yang masuk harus ramah lingkungan. Jangan sampai investasi masuk malah merusak lingkungan dan berdampak pada bencana sosial dan juga bencana alam. Untuk itu investor harus memastikan semua ijin telah diselesaikan terlebih dahulu dan mengutamakan warga sekitar sebagai pekerja," paparnya.

Dengan pendekatan ini, menurutnya investasi di Kota Batu diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

"Angka investasi yang diraih Kota Batu di Tahun 2023 sebesar Rp 1,5 Triliun, yang diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,044 Triliun dan penyertaan modal asing sebesar Rp 109, 678 Miliar. Artinya, Kota Batu sangat diminati oleh investor untuk menanamkan modal mereka di Kota Batu," ujar Aries.

Di sisi lain, saat disinggung mengenai sektor-sektor lain yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Aries juga menyebut bahwa sektor konstruksi menunjukkan kontribusi signifikan dengan nilai investasi mencapai Rp 361 miliar, diikuti oleh sektor kesehatan dengan Rp 329 miliar, dan sektor jasa dengan Rp 3 miliar. Sementara itu, sektor perdagangan, pertanian, dan pendidikan juga turut berkontribusi. (Santi/Dya)

Sudetan hingga Jacking, Jurus Pemkot Malang Atasi Banjir Jalan Galunggung

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang fokus berupaya melakukan penanganan banjir yang langganan menggenangi Jalan Galunggung, Kecamatan Klojen. Langkah-langkah strategis yaitu pembangunan sudetan yang akan dialirkan ke sungai Metro, serta penyelesaian masalah jacking di Kecamatan Klojen telah dilakukan.

"Jadi nanti dibuatkan sudetan di dekat ITN Jalan Sigura-gura, itu nanti tentunya kami sesuaikan dengan elevasinya. Nanti kami tarik ke arah barat sampai dekat hotel Ubud yang di Jalan Sigura-gura Barat itu, jadi nanti kita buang ke sungai Metro," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PPK) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, Rabu (24/1/2024).

Dandung menjelaskan, pembangunan sudetan tersebut berfungsi untuk mengurangi luapan air banjir yang selama ini melanda Jalan Galunggung. Dengan melakukan pembuangan sebagian air banjir ke sungai

Metro. "Karena kan fungsi sudetan itu untuk mengurangi luapan air banjir yang selama ini meluap ke Jalan Galunggung. Tapi nanti gak semua air banjir kita alirkan ke sungai Metro. Ada perhitungannya," tambah Dandung.

Ditegaskannya, bahwa pembangunan sudetan akan segera dilaksanakan pada tahun ini, dengan rencana realisasi pada semester satu tahun 2024. "Yang jelas itu kami akan laksanakan di tahun ini. Nanti akan kami realisasikan secepatnya di semester satu tahun 2024 ini. Sementara ini akan kita fokus di Galunggung dulu. Kalau di seluruh Kota Malang itu ada 30 an titik sudetan," tegas Dandung.

Selain dengan pembangunan sudetan, Pemkot Malang juga memiliki rencana lain dalam penanganan banjir di Jalan Galunggung, yakni dengan pengaktifan jacking yang sayangnya saat ini masih terbelunggu masalah hukum.

Dalam hal ini, Dandung menjelaskan bahwa kompleksitas

permasalahan sejak 2015 ini, semakin me-ningkat setelah kurator menggugat Pemkot Malang di Pengadilan Niaga Surabaya, dengan sebagian gugatan yang akhirnya dikabulkan. Sehingga membuat pihak pemerintah membayar dana sekitar Rp 14 miliar lebih.

"Karena mereka menganggapnya bahwa pekerjaan jacking itu sudah selesai. Tapi kami melihat pekerjaan itu belum selesai karena jacking belum berfungsi," ungkap Dandung.

Lebih lanjut, Dandung mengungkapkan bahwa jacking belum berfungsi dengan baik sebab terdapat beberapa manhole, atau sistem drainase yang berguna untuk memastikan kelancaran aliran dan pemeliharaan kebersihan, yang belum menyambung sepenuhnya.

"Dan ada juga saluran ke arah sungai Metro, kurang lebih 260 meter itu juga belum bisa tembus. Jadi, kami



Banjir yang melanda di Jalan Galunggung Kota Malang di tahun 2023 lalu. (Dok. Istimewa)

mengatakan selesai kalau hasil kegiatan itu berfungsi. Karena belum berfungsi, maka kita nyatakan belum selesai dan kita lakukan kasasi atas putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya itu pada tanggal 12 September 2023. Sekarang masih berproses," tambahnya. (Santi/dya)

UMAY SHAHAB

dari Tarik Suara ke Film

KIPRAH Umay Shahab di dunia sinematografi belum sepanjang keberadaannya di dunia musik. Namun, prestasinya di perfilman terbilang lumayan, terlebih setelah film yang disutradarainya, *Kukira Kau Rumah* (2021), memenangi beberapa penghargaan.

Salah satunya penghargaan Festival Film Indonesia (FFI) 2021 untuk kategori Aktris Terfavorit Pilihan Penonton.

Umay menyutradarai film tersebut melalui rumah produksi yang didirikannya bersama Prilly Latuconsina.

"Saya dari kecil memang seperti kelebihan energi. Jadi sekarang mumpung masih muda, masih 22 tahun, ya hajar saja terus. Ha-ha-ha," ujarnya di acara *Sinemaku Day*, Rabu (10/1/2024).

Di pekan pertama Januari 2024 itu, Umay dan Prilly mengumumkan tiga film yang akan mereka garap tahun ini. Salah satu filmnya, *Perayaan Mati Rasa* (2024), akan disutradarai Umay lagi.

Ia juga akan mengaransemen soundtrack film tadi dengan penyanyi dan pencipta lagu Natania Karin.

"Iseng-iseng aja. Soalnya juga enggak ada budget. Jadi, sebetulnya (menggarap soundtrack) ini berawal dari keterbatasan," ujar Umay.

Sebagai artis cilik, Umay pernah memenangi Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2011 kategori Album Solo Laki-Laki Anak-Anak Terbaik.

Setahun berikutnya, dia kembali memenangi AMI 2012 kategori Artis Solo Laki-Laki Anak-Anak Terbaik.

"Musik ataupun film, sama-sama exciting. Dari kecil, aku memang 'bancitampil'. Tapi, kalau dibandingkan, membuat film lebih menantang karena harus bekerja sama dan menyamakan visi dengan banyak orang," ujarnya.

Terjun ke dunia hiburan sejak kecil, Umay Shahab mempertahankan kesuksesannya hingga menginjak remaja.

Muhammad Arfiza Shahab atau yang lebih dikenal dengan nama Umay Shahab adalah pria kelahiran Jakarta, 16 Februari 2001. Ia adalah anak dari pasangan Said Hanafi dan Yahni Dahmayanti. Umay mempunyai adik laki-laki yang bernama Raffi Shahab.

Memulai kariernya pada umur yang masih sangat muda yaitu 5 tahun, Umay berperan dalam sebuah sinetron yang berjudul *Wulan* pada 2006. Waktu terus berjalan dan bakat Umay terus terasah.

Namanya makin banyak dikenal orang saat ia membintangi sinetron *Eneng* dan *Kaos Kaki Ajaib* yang tayang pada tahun 2007.

Setelah itu, Umay menuai kesuksesan. Ia ditawarkan banyak peran di berbagai judul sinetron. Sinetron-sinetron yang pernah ia bintang di antaranya, *Cahaya*, *Upik Abu* dan *Laura*, *Cerita Anak Langitan*, *Si Mamat Anak Metropolitan*, *Si Abay Anak Ajaib*.

Selain bermain sinetron, wajah Umay juga kerap muncul

sebagai model iklan di layar kaca. Banyak iklan dibintanginya untuk brand-brand lokal milik Indonesia.

Pada 2010, bertepatan usianya 9 tahun, Umay mulai merambah ke dunia tarik suara dengan mengeluarkan album berjudul *Umay*.

Ia mengandalkan lagu *SKJ* dari album miliknya. Album ini menuai kesuksesan dengan terjual sebanyak 250 ribu kopi dan juga meraih penghargaan triple platinum.

Album yang berjudul *Umay* itu juga mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Album Lagu Anak-Anak Terbaik di tahun 2011. Pada tahun 2011, Umay merilis album keduanya yang berjudul *Pesta Sekolah*.

Pada tahun 2011 dan 2012, Umay kembali mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia di kategori Artis Solo Laki-Laki Anak Terbaik.

Tak hanya itu karier Umay. Pelantun lagu *Gatotkaca* itu juga menginjakkan kakinya di dunia perfilman pada 2009, lewat film perdananya *The Tarix Jabrix*. Film lain yang ia bintang *Heart Beat* dan *Cinta Dibalik Awan*.

Umay mengaku dirinya menyukai berperan dalam sebuah film. Selain film dan sinetron, Umay juga sempat

berperan dalam sebuah web series yang berjudul *Is This Love?*

Sukses dengan kariernya di umur belia hingga remaja, Umay tetap memprioritaskan pendidikan. Sang ibu, sebagai managernya, yang mengatur semua jadwal keseharian Umay, mulai dari jadwal sekolah hingga syuting.

Umay yang memiliki 1,1 juta pengikut dalam akun Instagramnya, saat usianya menginjak 16 tahun terus berkarya di layar kaca. Kini ia tengah membintangi sinetron berjudul *Catatan Harian Aisha* dengan lawan mainnya Tissa Biani, Fazzil Alditto, dan Bio One. (*Kompas-Viva*)



“**Saya dari kecil memang seperti kelebihan energi. Jadi sekarang mumpung masih muda, masih 22 tahun, ya hajar saja terus. Ha-ha-ha,**”



DUDUK TERLALU LAMA, BERISIKO SAKIT JANTUNG DAN KANKER

PARA peneliti melaporkan bahwa orang-orang yang sering duduk terlalu lama di tempat kerja memiliki risiko kematian dan penyakit jantung.

Dilansir dari Medical News Today, belum lama ini, duduk terlalu lama, tanpa jalan, maka menaikan risiko kematian hingga 16% dan penyakit kardiovaskular (34%) dibandingkan dengan mereka yang biasanya tidak duduk, setelah disesuaikan dengan jenis kelamin, usia, pendidikan, merokok, minum, dan indeks massa tubuh.

Penelitian ini melibatkan peserta dalam program pengawasan kesehatan di Taiwan yang ditindaklanjuti antara tahun 1996 dan 2017.

Data tentang aktivitas duduk di tempat kerja, aktivitas fisik di waktu senggang, gaya hidup, dan parameter metabolisme dikumpulkan, dan analisis data dilakukan pada bulan Desember 2020.

Duduk terlalu lama di tempat kerja sangat berbahaya bagi orang-orang yang melakukan aktivitas rendah (15-

29 menit per hari) atau tidak sama sekali (kurang dari 15 menit per hari).

Dampak bagi kesehatan dari duduk sehari-hari di tempat kerja

Para peneliti menunjukkan bahwa "sebagai bagian dari gaya hidup modern, duduk dalam waktu lama di tempat kerja dianggap normal dan belum mendapat perhatian, meskipun dampak buruknya terhadap kesehatan telah terbukti."

Banyak orang menilai bahwa duduk lama di kantor merupakan budaya normal di tempat kerja. Namun, banyak orang yang tidak menyadari dari menormalisasi kondisi ini.

Dokter perawatan primer dan direktur medis Florida Injury Center, Kevin Huffman mengatakan duduk di tempat kerja sering kali menyebabkan gaya hidup yang tidak banyak bergerak atau mager/malas gerak.

"Ini berarti kita harus bergulat dengan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung dan diabetes - sebuah akumulasi yang sangat buruk," kata Huffman.

Dia mengatakan bahwa "Orang-orang yang duduk dalam waktu lama mempunyai risiko yang lebih tinggi - 14 persen terkena penyakit jantung dan, yang mengkhawatirkan, sekitar 13 persen terkena kanker."

Bagaimana cara menghindari gaya hidup duduk lama di tempat kerja?

Huffman mengatakan solusi untuk lingkungan kerja yang tidak banyak bergerak dapat dilakukan dengan "penyesuaian yang halus - tetapi berdampak - terhadap jadwal harian kita."

Dia menyarankan agar Anda melakukan modifikasi gerakan, termasuk berdiri sambil menerima panggilan telepon.

Alternatifnya, ini bisa berupa jalan-jalan singkat setiap jam. Seluruh upaya ini bersatu untuk mengatasi masalah yang pada akhirnya menjadi masalah menetap yang tidak ada habisnya.

"Daripada mengirim email kepada kolega Anda dari kantor sebelah, berjalan-jalanlah sebentar dan libatkan mereka dalam percakapan. Perubahan kecil ini secara signifikan dapat mengurangi total waktu duduk jika diakumulasi," tambah Huffman.

American Journal of Preventive Medicine telah melakukan penelitian yang menekankan bahwa mengganti perilaku menetap selama 30 menit dengan aktivitas fisik sederhana - seperti berjalan kaki misalnya - akan meningkatkan kesehatan secara signifikan.

Huffman mengatakan kuncinya adalah konsistensi, apakah latihan tambahan dilakukan di dalam atau di luar kantor.

Menurutnya, melakukan aktivitas sederhana seperti jalan cepat, bersepeda - atau bahkan menari bisa sangat manjur. Namun, kunci utamanya terletak pada konsistensi.

"Jika seseorang berhasil memper-tahankan aktivitas sedang hingga berat selama 15 hingga 30 menit ke dalam rutinitas sehari-hari, mereka pasti akan menyaksikan penurunan signifikan dalam potensi risiko terkait penyakit kronis," tutupnya (Bisnis)



RIBUAN CEO KETAR-KETIR SOAL MASA DEPAN BISNISNYA



JUMLAH para petinggi perusahaan yang khawatir akan masa depan bisnisnya dalam 10 tahun ke depan terus meningkat. Faktornya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dan perubahan iklim.

Dari survei terhadap lebih dari 4.700 CEO di seluruh dunia dirilis PwC, sebanyak 45% di antaranya khawatir bisnis mereka tidak akan dapat bertahan dalam satu dekade ke depan tanpa adanya terobosan baru.

Jumlah CEO yang merasakan kekhawatiran terhadap masa depan bisnis mereka karena kedua faktor tersebut di atas naik dari 39% pada tahun lalu.

"Hal ini akan secara signifikan mengubah cara perusahaan dalam menciptakan, memberikan, dan memperoleh nilai tambah dalam 3

tahun ke depan," kata Global Chairman of PwC Bob Moritz dikutip dari Associated Press (AP).

Kendati lebih dari separuh CEO mengatakan AI akan membuat produk atau layanan mereka lebih baik, tetapi 69% menyatakan pekerja mereka masih memerlukan pelatihan agar mampu menggunakan teknologi itu.

Para petinggi perusahaan tersebut juga khawatir dengan dampak AI dalam meningkatkan risiko keamanan siber dan misinformasi.

Seperti halnya AI, perubahan iklim juga dianggap sebagai peluang sekaligus risiko.

Jumlah CEO yang mengatakan perubahan iklim diharapkan mengubah cara mereka melakukan hal-hal dalam tiga tahun mendatang semakin meningkat, hampir

sepertiganya.

Lebih dari tiga perempat para eksekutif tersebut mengatakan bahwa mereka telah memulai atau menyelesaikan perubahan untuk meningkatkan efisiensi energi.

Hanya 45% yang mencatat bahwa mereka telah membuat kemajuan dalam mempertimbangkan risiko iklim dalam perencanaan keuangan.

Lebih takut ketimbang perang

Presiden Joko Widodo menyebut dunia saat ini lebih takut terhadap perubahan iklim ketimbang pandemi atau perang.

Presiden mengatakan dunia internasional takut terhadap perubahan iklim karena menyebabkan frekuensi bencana alam naik drastis.

Menurutnya, Indonesia menempati tiga negara teratas paling rawan bencana. Frekuensi bencana alam Indonesia naik 81%, dari tahun 2010 sebanyak 1.945 bencana, melompat menjadi 3.544 bencana di 2022.

"Tidak hanya urusan banjir, tidak hanya urusan gunung berapi yang meletus, bukan hanya urusan tanah longsor. Yang lebih sering gempa bumi dan bencana alam maupun non alam lainnya yang kita hadapi," kata Jokowi dalam rakornas penanganan bencana beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu Presiden menekankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjadi kunci dalam menghadapi bencana alam.

Dia menegaskan pengelolaan prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana harus

dilakukan dengan baik oleh semua pihak.

Manusia tak akan kalah

Sebelumnya, Jokowi menanggapi banyaknya kekhawatiran masyarakat terhadap disrupsi teknologi, mulai dari angkatan tenaga kerja yang tergantikan oleh mesin, hingga perilaku konsumen yang serba digital.

Jokowi yakin teknologi maupun mesin yang semakin pintar tidak akan bisa mengalahkan manusia yang punya perasaan.

Ia meminta masyarakat untuk tidak takut atau khawatir. Sebab, disrupsi teknologi adalah suatu tantangan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, manusia hanya perlu mencari solusi atas tantangan tersebut.

Jokowi juga meminta agar masyarakat tidak alergi dengan perubahan teknologi. Jokowi menjelaskan dari pertemuannya dengan berbagai negara sahabat dalam KTT ASEAN, pertemuan G7, maupun pertemuan G20, semua negara mengungkapkan ketakutannya terhadap kecerdasan buatan.

Oleh sebab disrupsi teknologi ini tidak terhindarkan dan dialami oleh seluruh negara di dunia, Indonesia sebagai negara perlu menciptakan regulasi dan aturan main. Selain itu, masyarakat perlu bersiap diri mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada.

"Teknologi tak akan bisa mengalahkan manusia karena mesin itu hanya punya chip, tapi manusia punya hati, punya rasa, mesin nggak punya. Saya percaya bahwa ciptaan Allah SWT akan selalu lebih unggul dan lebih mulia," pungkas Jokowi (Bisnis-Investor)





SEBERAPA SERING

HARUS CUCI BOTOL AIR MINUM?

PAKAR keamanan pangan di Penn State University Martin Bucknavege, mengingatkan pentingnya seseorang mencuci botol air yang dapat digunakan berulang kali karena tidak mencuci botol akan meningkatkan risiko mikroba terakumulasi di dalam botol.

"Setiap kali botol tidak bersih dan ada kelembapan di dalam botol, hal itu akan mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur," kata dia seperti disiarkan Health pada 18 Januari lalu.

Kemungkinan botol air yang dipenuhi kuman tidak hanya menjijikkan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan, kata profesor ilmu pangan di Rutgers University Donald Schaffner, PhD.

"Meskipun kecil kemungkinan botol kotor membuat Anda terpapar sesuatu yang bersifat patogen, kemungkinannya bukan nol," ujar dia.

Seberapa sering harus mencuci?

Para ahli sepakat bahwa penting untuk mencuci botol secara teratur, namun waktunya misalnya setiap hari atau setiap beberapa hari dapat bergantung pada beberapa faktor.

Menurut Schaffner, jika seseorang menggunakan botol setiap hari, maka mencucinya setiap minggu atau beberapa hari sekali adalah jangka waktu yang wajar.

Namun cara penyimpanannya dan bahan botol dapat mengubah perhitungan tersebut.

"Jika botolnya ada di dalam ransel

atau tas dan bagian luar terbentur benda, mungkin botol tersebut akan lebih cepat kotor dibandingkan jika diletakkan di samping Anda sepanjang hari," ujarnya.

Selain itu, bahan plastik mungkin lebih kondusif bagi mikroorganisme dibandingkan baja tahan karat atau kaca, sehingga memiliki lebih banyak celah bagi bakteri untuk masuk.

"Plastik juga bisa menyerap bau," kata Schaffner.

Sementara itu, Bucknavege merekomendasikan seseorang untuk membersihkan botolnya setiap kali selesai digunakan, seperti halnya peralatan makan lain seperti gelas atau piring.

Jika seseorang tak punya banyak waktu, Schaffner dan Bucknavege menyarankan untuk memprioritaskan mencuci bagian mulut botol dibandingkan bagian lainnya. Lalu, jika rutinitas pembersihan menjadi terlalu sulit untuk dilakukan, Schaffner menawarkan standar alternatif yakni mencucinya jika botol terlihat kotor.

Bagian dalam botol air minum adalah lingkungan lembap yang sempurna untuk penyebaran kuman atau jamur. Akhirnya, itu bisa membuat Anda sakit, kata Jessica Ek, juru bicara American Cleaning Institute, dikutip dari The Spruce Eats.

Dalam sebuah studi oleh Treadmill Reviews, peneliti menyeka selusin botol air yang digunakan oleh atlet yang tidak dicuci dalam seminggu.

Mereka menguji botol air minum

model screw-top, slide-top, squeeze-top, dan straw-top. Para peneliti menemukan bahwa mereka memiliki lebih dari 300.000 unit pembentuk koloni per sentimeter persegi (CFU/sq cm).

Singkatnya, itu mencakup sekitar enam kali lebih banyak dari mangkuk air anjing (47.383 CFU) dan hanya sedikit lebih sedikit dari tempat sikat gigi yang ada di kamar mandi (331.848 CFU).

Botol minum slide-top di mana Anda hanya membuka dan menutup tutupnya memiliki kuman paling banyak, sementara botol straw-top secara mengejutkan jauh lebih rendah daripada jenis lainnya.

Cara mencuci botol air minum

Pertama, periksa label atau lihat situs pabrikan online. Banyak botol air minum yang dapat digunakan kembali

dapat dibersihkan di mesin pencuci piring.

Seringkali Anda perlu meletakkan tutup botol air minum di rak paling atas. Anda masih perlu melakukannya setelah setiap kali Anda menggunakannya.

Untuk mencuci botol air minum dengan tangan, inilah yang disarankan oleh Ek. Pertama, isi botol air minum dengan air dan sabun cuci piring.

menggosok bagian dalam botol dan semua bagian tutup botol yang sulit dijangkau. (Antara-Kompas)



Presiden Ikut ... (dari Hal 1)

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo bahwa presiden dapat ikut kampanye dan memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memicu kehebohan. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang, Muchamad Ali Safa'at, Rabu (24/1/2024), mengatakan, jika bicara aturan hukum, Undang-Undang Pemilu memang memberikan hak kepada presiden untuk melakukan kampanye.

Begitu pula dalam nega-krasi, presiden bisa berkampanye. Apalagi jika yang bersangkutan maju sebagai petahana. Dengan demikian,

Namun perlu dicatat, ada larangan pemanfaatan fasilitas negara. Masalahnya, di Indonesia sulit untuk memisahkan fasilitas negara yang bisa digunakan dan mana yang harus ditinggalkan. "Karena kesulitan itu, pada akhirnya presiden sebagai simbol menjadi tidak netral, tidak fair," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Saat dijumpai di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya sebagai Presiden boleh saja berkampanye. "Ya, boleh saja saya berkampanye, tetapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara," ujarnya.

Adapun dalam Pilpres 2024 ini, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai salah satu kandidat. Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres), mendampingi calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Majunya Gibran sebagai cawapres sempat menuai polemik sehingga berujung pada penjatihan sanksi berat terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, berupa pemberhentian Anwar dari jabatannya sebagai ketua MK pada November 2023. Majelis Kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi menyatakan bahwa Anwar yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi itu terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik terkait dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia calon presiden-calon wakil presiden. Berkat jatuhnya putusan MK No 90/PUU-XXI/2023, Gibran dapat ikut maju sebagai kandidat Pilpres 2024.

Dukungan seorang presiden terhadap salah satu kandidat juga tidak mewujudkan keadilan elektoral. Apalagi, calon yang didukung berpolemik dan anaknya sendiri. Menurut Safa'at bagaimana pun dukungan seorang presiden kepada salah satu pasangan capres-cawapres akan sangat menguntungkan bagi pasangan calon tersebut. Sementara jabatan presiden sebenarnya jabatan publik. Ketika jabatan itu dipakai untuk mendukung salah satu calon, dengan sendirinya itu adalah penyalahgunaan jabatan.

"Karena tidak mungkin satu orang lalu masyarakat bisa melihat dia sebagai pribadi atau sebagai presiden. Pasti akan dilihat sebagai presiden," ucapnya.

Dukungan seorang presiden terhadap salah satu kandidat juga tidak mewujudkan keadilan elektoral.

Apalagi, calon yang didukung berpolemik dan anaknya sendiri yang dipandang memiliki masalah dari sisi etika.

Disinggung soal dampak dari keputusan itu, Safa'at mengatakan keterbelahan akan semakin kuat. Di satu sisi, bagi yang mendukung, termasuk dukungan terhadap pasangan calon yang didukung oleh presiden, bisa menaikkan elektoral. Sebaliknya, level ketidaksenangan semakin naik di kalangan mereka yang tidak setuju akan hal itu.

Hal senada disampaikan pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari. Dihubungi secara terpisah, Wawan menilai secara aturan UU No 7/2017 Pasal 281 memang membolehkan presiden kampanye dan harus cuti. Namun, secara etika politik hal itu menjadi masalah. "Apakah presiden bisa menjaga etika politik ketika berkampanye?" ucapnya.

Menurut Wawan, setidaknya ada tiga etika yang dilanggar. Pertama, presiden sulit menghindari konflik kepentingan. Benturan kepentingan menjadi keniscayaan karena yang dibela merupakan keluarga.

Kedua, presiden dinilai gagal menghadapi dilema representasi, yakni representasi sebagai presiden dan kepala negara, serta representasi sebagai bagian dari kontestasi pemilu. "Representasi yang baik adalah ketika beliau sebagai kepala negara harusnya dia tidak memihak. Idealnya begitu," ucapnya.

Problem ketiga bahwa pernyataan presiden tidak menggunakan justifikasi etika. Dia hanya berdasarkan pada aturan tertulis. Meski boleh secara de jure hukum, faktanya masyarakat lebih senang jika presiden bersandar pada prinsip etika dan moralitas.

Sementara, Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu karena menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Padahal, menurut Ubedilah, UU Pemilu mengamanatkan beberapa ketentuan yang menekankan perlunya netralitas presiden. "Misalnya Pasal 48 ayat (1) huruf b UU menetapkan bahwa KPU harus melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dan tugas-tugas lainnya kepada DPR dan Presiden," kata Ubedilah kepada Kompas.com, Rabu (24/1/2024).

"Artinya posisi struktural itu (KPU lapor ke Presiden) menunjukkan bahwa Presiden bukan menjadi bagian yang terlibat dalam proses kontestasi elektoral, agar tidak ada abuse of power dalam proses pemilihan umum," sambungnya.

Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Pemilu tersebut juga mengatur bahwa presiden memiliki peran dalam membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. Posisi menetapkan tim seleksi KPU itu membuat Presiden berkewajiban untuk netral dalam seluruh proses pemilu. "Sangat berbahaya jika posisi

Presiden tidak netral sejak menyusun tim seleksi anggota KPU maka seluruh anggota KPU dimungkinkan adalah orangnya Presiden. Ini pintu kecurangan sistemik. Pada titik inilah Presiden berkewajiban netral," jelas Ubedilah.

"Mencampuradukkan antara jabatan politis, kepala negara dan kepala pemerintahan itu tidak dapat dibenarkan, itu bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang, abuse of power," tambah dia. Ia menjelaskan, dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat jelas diatur agar tidak mencampuradukkan kewenangan. "Mencampuradukkan wewenang itu sama saja bekerja di luar ruang lingkup bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan yang diamanahkan oleh wewenang tersebut. Karenanya Presiden Jokowi sesungguhnya telah nyata-nyata melanggar undang-undang," pungkasnya.

Kubu Lawan Tagih Netralitas

Jubir Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Amiruddin Al Rahab, menilai sikap Jokowi itu tidak patut secara politik. "Sikap Presiden seperti itu dalam politik, sebagai analisis politik, dalam politik disebut namanya politically incorrect. Kenapa? Sikap seperti itu bisa mencederai proses dari jalannya seluruh kepemimpinan ini. Sebagai chief of executive, kepala pemerintahan, kepala negara kan presiden semestinya memberi contoh yang baik kepada semua aparaturnya. Dengan pernyataan seperti itu, dia tidak lagi menjadi contoh yang baik. Itu yang namanya kepatutan politik," kata Amir kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM itu menyayangkan pernyataan Jokowi tersebut disampaikan di depan Panglima TNI dan KSAD. Menurut Amir, pernyataan tersebut berpotensi membuat keragu-raguan pada prajurit TNI di lapangan.

Amir juga bertanya-tanya apakah Jokowi masuk dalam tim kampanye salah satu Capres. Jika memang Jokowi hendak berkampanye, Amir mengatakan mantan Gubernur DKI itu harus mengajukan cuti.

"Kalau kita bicara hukumnya, apakah presiden tercatat dalam daftar anggota tim kampanye dari salah satu Capres yang hari ini ada. Saya nggak tahu, apakah ada tercatat di KPU, karena semua yang juru kampanye harus tercatat di KPU. Untuk itu dia harus mengajukan cuti, itu perintah UU, harus cuti. Nah selama ini saya tidak pernah mendengar ada Presiden mengajukan cuti. Sehingga Wakil Presiden yang memang empang tumpu kekuasaan," ujar Amir.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan maksud pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Komarudin mengingatkan ada etika berbangsa yang harus dijalankan Jokowi sebagai kepala negara.

"Ya dalam konteks apa dulu,

Presiden sebagai capres atau Presiden itu sendiri ada dalam parpol yang mencalonkan capres-cawapres. Kan Pak Jokowi sekarang dalam posisi sebagai apa," katanya. "Sebagai Presiden yang selama ini dikhawatirkan dan diminta oleh rakyat itu adalah untuk menghindari terjadinya KKN," tambahnya.

Komarudin menuturkan seharusnya Jokowi lebih bisa menjaga posisi sebagai kepala negara bagi seluruh rakyat. Menurutnya, jika benar Jokowi turun berkampanye untuk anaknya Gibran Rakabuming Raka akan menjadi sejarah baru di dunia.

"Kan anaknya dicalonkan jadi Wapres. Jadi, kalau bapaknya Presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu yang harus dihindari, ini soal etik moral berbangsa itu," katanya.

Ia menambahkan saat ini banyak tokoh senior bangsa yang terus konsisten menjaga prinsip bernegara. Komarudin pun berharap Jokowi melakukan hal serupa. "Itu sampai senior-senior orang-orang, tokoh-tokoh nasional yang sudah tua-tua ini semua yang memperjuangkan, ini kan prinsip bernegara. Pak Jokowi sendiri waktu pidato ke depan MPR, waktu pelantikan, saya masih ingat kata-kata dia, dia hanya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat," tutur anggota Komisi II DPR itu.

"Kalau tindakan seperti begitu, apa tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat," tandas dia. (wid,rls,ist,ant/dya)

ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA UU PEMILU PASAL 304 AYAT 1

- Presiden, Wapres dan pejabat negara lain dilarang memakai fasilitas negara ketika ikut turun kampanye.
- Fasilitas negara yang dilarang, yaitu: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- Fasilitas negara lain yang dilarang yaitu sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Sementara, UU Pemilu juga mengatur tempat tersebut boleh digunakan oleh pejabat untuk berkampanye yakni bila gedung atau fasilitas negara itu disewakan kepada umum. Tempat lain yang diperbolehkan adalah penggunaan fasilitas pengamanan pejabat.

Dubes Israel Bicara di Debat PBB Menlu RI Retno Marsudi Pilih 'Walk Out'

NEW YORK- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi memilih 'walk out' saat Duta Besar Israel untuk PBB memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.

Sebelumnya, selain mengajukan tiga tuntutan, Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya terkait Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.

Retno mengatakan Open Debate DK PBB ini merupakan yang ketiga dalam 3 bulan terakhir. Indonesia hadir dalam ketiga sidang PBB tersebut sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

"Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida," ujar Retno Marsudi dalam YouTube MoFA Indonesia, Rabu (24/1/2024).

Retno mengingatkan, piagam PBB yang mengatur tentang resolusi DK PBB yang patut dilaksanakan dan mengikat. Namun Retno mempertanyakan berapa banyak resolusi DK PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan.

"Saya juga mengingatkan piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah 'sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?'" kata Retno.

"Sebagai catatan teman-teman pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar," sambungnya.

Retno mempertanyakan ke mana Palestina akan mengadu jika DK PBB yang memiliki mandat menjaga perdamaian internasional justru gagal menjalankan resolusinya. Menlu menegaskan Indonesia mendesak agar DK PBB segera menghentikan Israel yang melakukan kekerasan di Palestina.

"Ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum," kata Retno.

"Sekali lagi saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,"



Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi saat memberi penjelasan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait Palestina di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/1/2024). (ist)

sambungannya.

Retno mendesak agar DK PBB segera bertindak karena semakin meningkatnya korban tewas maupun yang kelaparan di Palestina. Selain itu, ia mendorong semua pihak untuk menghormati hukum internasional, termasuk di Gaza.

"Saya juga bertanya di depan Dewan Keamanan PBB apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak? Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum humaniter internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza," ujarnya.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (24/1/2024) Senada dengan Indonesia, Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pasca-perang sebagai hal yang 'tidak dapat diterima'. "Pendudukan Israel harus berakhir," ujar Guterres.

"Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah

menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," lanjutnya.

Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan mengklaim bahwa sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya. "Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang ini akan langsung berakhir," ujarnya.

Palestina Desak Netanyahu Disanksi

Sementara, Menlu Otoritas Palestina, Riyad al Maliki, mengatakan masyarakat internasional harus bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. "Dunia juga harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian," lanjutnya.

Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, yang mewakili Palestina dalam forum tersebut, mengatakan tidak heran dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak solusi dua

negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.

"Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutip," kata al Maliki.

"Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan," tambahnya.

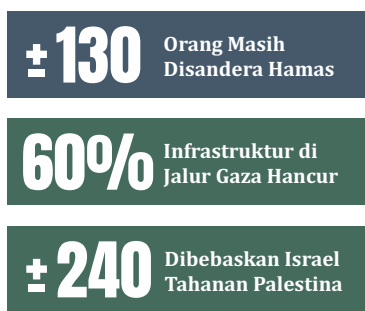
Usai menyimak pernyataan Sekjen PBB dan Menlu Palestina yang diberi kesempatan lebih dahulu untuk menyampaikan argumen dalam debat, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Ergan menimpali seruan cendekiawan dan kecaman yang dilontarkan keduanya. Ia mengatakan, sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.

"Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, maka perang ini akan langsung berakhir," ujarnya.

Perang terbaru antara Israel dan Hamas dipicu serangan dadakan kelompok militan Palestina itu ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Hamas juga menculik sekitar 240 lainnya, yang sebagian telah dipulangkan berkat mediasi Qatar dan Amerika.

Israel melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan serangan udara dan invasi darat, yang sejauh ini hampir meratakan seluruh wilayah Gaza, menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 60.000 lainnya. Israel juga memblokir wilayah kantong itu dan menyebabkan krisis kemanusiaan, setelah 85% penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan. (voa,reuters,afp,ist/dya)

DAMPAK PERANG ISRAEL VS PALESTINA



*Data hingga 15-1-2024

